GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA POTENSI WISATA ALAM DI DESA TLOGOPAKIS

Bambang Hermanto[1], Stanley Khu[2], Evany Sofia Prameswari[3], Arya Alfa Rizqi[4], Suntung[5]
[1,3,4]Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang
[2]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang
[5,]Pemerintah Desa Tlogopakis
Email Korespondensi: bambanghermanto@mail.unnes.ac.id
Email: stanleykhu@mail.unnes.ac.id; evanysofia@mail.unnes.ac.id; aryaalfa24@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

This article analyzes the role of the village government in implementing governance policies for the management of natural tourism potential in Tlogopakis Village. Although Tlogopakis Village possesses significant natural tourism resources, their utilization has not yet generated optimal benefits for improving community welfare. As the primary actor in public policy implementation, the village government plays a crucial role in establishing effective governance through planning, implementation, coordination, and community empowerment. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were analyzed using an interactive data analysis technique consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Tlogopakis Village Government has played an active role in implementing tourism governance policies by formulating destination development programs, strengthening collaboration with various stakeholders, and empowering local communities through capacity-building programs and the development of micro-enterprises. Nevertheless, the implementation process continues to face several challenges, including limited human resource capacity, inadequate financial support, insufficient tourism promotion, and suboptimal community participation in destination management.
Keywords: Governance, Policy implementation, Village government.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam di Desa Tlogopakis. Desa Tlogopakis memiliki potensi wisata alam yang signifikan, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah desa sebagai aktor utama kebijakan publik diperlukan untuk membangun tata kelola yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tlogopakis telah berperan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan potensi wisata melalui penyusunan program pengembangan destinasi, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan usaha mikro. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pendanaan, dan promosi wisata, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pengelolaan destinasi.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pemerintah desa, Tata kelola.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, serta mewujudkan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat (Fikri et al., 2026). Salah satu pilar strategis adalah pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang untuk mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, serta mengembangkan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak lagi berperan sebagai pelaksana administrasi semata, Pemerintah desa juga sebagai aktor utama dalam membangun tata kelola pembangunan yang kolaboratif, adaptif, dan partisipatif. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa menjadi prasyarat penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai basis pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Manaf et al., 2018; Fitriana et al., 2024).

Wisata alam menjadi salah satu sektor potensi lokal yang memiliki prospek besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Strategi pembangunan pengembangan wisata alam berbasis masyarakat (*community-based tourism*) mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menambah lapangan kerja, mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil, serta melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Namun demikian, keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan pemerintah desa, kualitas tata kelola, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan. Tata kelola yang tidak terintegrasi berpotensi menyebabkan pengelolaan destinasi wisata berjalan kurang efektif sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Pusparini & Dirgantara, 2025; Faturohman & Subhan, 2026).

Implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi, mengelola sumber daya, memperkuat kelembagaan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Keberhasilan tata kelola wisata alam sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan *collaborative governance* menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola wisata yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Fitriana et al., 2024; Sampetamma et al., 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berbasis kolaborasi mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Manaf et al. (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan *community-based tourism* sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antarlembaga serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian Fitriana et al. (2024) juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa wisata memerlukan dukungan tata kelola kolaboratif melalui sinergi berbagai aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Sementara itu, Pusparini dan Dirgantara (2025) menemukan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan desa wisata sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa dalam mengelola kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi terhadap peningkatan daya saing destinasi wisata sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat, atau model *collaborative governance*. Kajian yang secara khusus menganalisis peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam sebagai instrumen penguatan kemandirian ekonomi masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, implementasi kebijakan menjadi aspek yang menentukan keberhasilan pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi wisata

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis mengenai hubungan antara implementasi kebijakan pemerintah desa, tata kelola potensi wisata alam, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam yang cukup besar, di antaranya Curug Bajing beserta berbagai potensi ekowisata lainnya. Potensi tersebut menjadi modal strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata. Namun, berdasarkan hasil identifikasi lapangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan wisata di Desa Tlogopakis masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain belum tersusunnya *roadmap* pengembangan wisata secara komprehensif, belum optimalnya regulasi desa mengenai tata kelola wisata, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan destinasi, serta belum optimalnya peran BUMDes dan Pokdarwis dalam mengembangkan usaha wisata secara profesional. Akibatnya, potensi wisata alam yang dimiliki desa belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam di Desa Tlogopakis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan, tata kelola pemerintahan desa, dan *collaborative governance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola wisata alam berbasis potensi lokal guna mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam di Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif melalui eksplorasi pengalaman, interaksi, serta makna yang dibangun oleh para aktor dalam proses implementasi kebijakan. Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara kontekstual dinamika tata kelola wisata alam pada satu lokasi penelitian sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah desa, tata kelola wisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Creswell & Creswell, 2023; Bingham, 2023).

Lokasi penelitian berada di Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa desa tersebut memiliki potensi wisata alam yang berkembang, khususnya di kawasan Curug Bajing, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan tata kelola wisata, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Desa Tlogopakis sebagai kasus yang relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan wisata alam berbasis pemerintahan desa.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pengelolaan wisata. Informan meliputi Kepala Desa Tlogopakis, perangkat desa, pengelola BUMDes, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha mikro, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas wisata. Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai kejenuhan data (data saturation) sehingga informasi yang diperoleh mampu menggambarkan fenomena penelitian secara komprehensif (Creswell & Creswell, 2023).

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan strategi para pemangku kepentingan terkait implementasi kebijakan tata kelola wisata alam. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi destinasi wisata, aktivitas ekonomi masyarakat, serta praktik tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah desa. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Peraturan Desa, dokumen BUMDes, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengembangan wisata desa.

Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking dilakukan untuk menjaga validitas data. Triangulasi sumber membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada beberapa informan mengenai hasil interpretasi peneliti untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dengan kondisi empiris di lapangan. Strategi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian (Bingham, 2023).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Proses analisis diawali dengan mengorganisasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilakukan proses pengkodean (coding), identifikasi tema, serta interpretasi terhadap hubungan antartema. Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan tata kelola wisata alam, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta implikasinya terhadap penguatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan analisis yang sistematis dan iteratif memungkinkan peneliti menghasilkan temuan yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Tlogopakis dalam Implementasi Kebijakan Tata Kelola Potensi Wisata Alam

Pemerintah Desa Tlogopakis memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal, termasuk pengelolaan wisata alam sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, kewenangan pemerintah desa tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tlogopakis telah menginisiasi berbagai upaya pengembangan wisata alam melalui penyusunan program pembangunan desa yang memasukkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi. Fokus tersebut didasarkan pada potensi wisata Curug Bajing dan kawasan ekowisata di sekitarnya yang dinilai memiliki daya tarik tinggi sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun demikian, implementasi kebijakan masih berada pada tahap penguatan kelembagaan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa agar tata kelola wisata mampu berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan potensi wisata saja belum cukup untuk menghasilkan dampak ekonomi apabila tidak diikuti oleh kapasitas pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten.

Pemerintah Desa Tlogopakis telah menjalankan fungsi sebagai regulator melalui penyusunan arah kebijakan pengembangan wisata, meskipun regulasi teknis berupa roadmap dan Peraturan Desa mengenai tata kelola wisata masih dalam proses penyempurnaan. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

antaraktor belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pelaksanaan program masih bersifat sektoral. Berdasarkan hasil wawancara, aparatur desa menyadari bahwa keberadaan dokumen perencanaan jangka menengah dan regulasi operasional menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan destinasi wisata memiliki kepastian arah pembangunan, pembagian kewenangan, serta mekanisme evaluasi yang jelas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fitriana, Wijaya, dan Wanto (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan desa wisata dipengaruhi oleh keselarasan antara substansi kebijakan, kapasitas pelaksana, dan dukungan kelembagaan kolaboratif. Kebijakan yang memiliki legitimasi formal akan mempermudah koordinasi antarorganisasi sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaksana terhadap tujuan pembangunan wisata desa.

Pemerintah Desa Tlogopakis sebagai regulator juga berperan sebagai fasilitator dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi kegiatan pengabdian, pemerintah desa melibatkan BUMDes, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan akademisi dalam proses identifikasi potensi, pelatihan tata kelola wisata, serta penyusunan strategi pengembangan destinasi. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa intensitas kolaborasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pembagian peran, koordinasi program, dan kesinambungan pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai tahap kolaborasi yang matang sehingga memerlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas kelembagaan. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Manaf et al. (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan community-based tourism sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama yang didukung oleh kolaborasi antarlembaga secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa Tlogopakis juga menjalankan fungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi lokal melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Program pelatihan pengelolaan destinasi, penguatan kapasitas BUMDes, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan kompetensi pelaku wisata merupakan bentuk intervensi pemerintah desa untuk menciptakan ekosistem ekonomi berbasis wisata alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta promosi destinasi yang belum optimal. Dampaknya, manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat masih didominasi oleh pelaku usaha tertentu dan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara merata. Dalam perspektif collaborative governance, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) yang mampu membangun kepercayaan, menyatukan kepentingan para aktor, serta menjaga keberlanjutan kolaborasi. Penelitian mengenai pengembangan desa wisata di Indonesia juga menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintah desa merupakan faktor penting dalam membangun sinergi antaraktor dan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan wisata berbasis masyarakat.

Peran Pemerintah Desa Tlogopakis dalam implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi strategis melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pembangunan ekonomi masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah desa berupaya membentuk arah kebijakan melalui penyusunan berbagai aturan dan program yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Pada saat yang sama, fungsi fasilitator diwujudkan melalui penyediaan dukungan administratif, penguatan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas kepariwisataan. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah desa berperan mendorong terbangunnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok sadar wisata, pelaku usaha, dan pihak eksternal dalam mengoptimalkan potensi wisata alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi desa. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

Implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat struktural maupun operasional. Dari aspek regulasi, belum tersusunnya kebijakan operasional yang komprehensif menyebabkan pelaksanaan program pengembangan wisata belum memiliki standar implementasi yang jelas, terutama terkait pembagian kewenangan, mekanisme pengelolaan, dan sistem pengawasan. Selain itu, kapasitas aparatur pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pengelolaan destinasi, hingga pengembangan kelembagaan pariwisata masih memerlukan penguatan agar mampu menjawab dinamika pengelolaan wisata yang semakin kompleks. Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, baik antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, maupun mitra eksternal, sehingga sinergi program belum dapat diwujudkan secara optimal. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga masih belum merata karena keterlibatan warga cenderung didominasi oleh kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya belum memiliki kesadaran maupun kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan destinasi wisata.

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam. Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik lokal, peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan kelembagaan pengelola wisata, serta pengembangan model tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan peran seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif menjadi semakin relevan karena pembangunan desa wisata pada hakikatnya merupakan proses multidimensional yang tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah desa, tetapi juga pada tingkat kepercayaan, komitmen, dan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari sektor swasta, akademisi, dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata tidak semata-mata ditentukan oleh keberlimpahan potensi sumber daya alam, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa yang mampu mengintegrasikan kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara efektif. Tata kelola yang baik akan menciptakan sistem pengelolaan wisata yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat desa dalam jangka panjang.

Implementasi Tata Kelola Wisata Alam Berbasis Kolaborasi dalam Penguatan Kelembagaan Desa

Implementasi tata kelola wisata alam di Desa Tlogopakis menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah desa sebagai aktor tunggal, melainkan memerlukan kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tlogopakis telah membangun pola kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha mikro, tokoh masyarakat, serta perguruan tinggi dalam rangka memperkuat tata kelola wisata alam. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan identifikasi potensi wisata, penyusunan arah kebijakan pengembangan destinasi, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan kelembagaan. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa sinergi antaraktor masih berada pada tahap koordinatif sehingga belum sepenuhnya menghasilkan mekanisme pengelolaan yang terintegrasi. Kondisi tersebut terlihat dari belum adanya pembagian peran yang terdokumentasi secara formal, standar operasional pengelolaan destinasi, serta sistem evaluasi kolaboratif yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan wisata secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa Tlogopakis telah berupaya memperkuat kelembagaan pengelolaan wisata melalui optimalisasi fungsi BUMDes dan Pokdarwis sebagai pelaksana operasional di tingkat desa. Namun demikian, kedua lembaga tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain kapasitas manajerial yang belum memadai, rendahnya kemampuan perencanaan bisnis wisata, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi digital dalam promosi destinasi. Akibatnya, pengelolaan wisata masih bersifat administratif dan belum berkembang menjadi sistem bisnis yang mampu menghasilkan nilai ekonomi

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

secara optimal bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan organisasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta pengembangan jejaring kemitraan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Manaf et al. (2018) yang menegaskan bahwa keberhasilan community-based tourism sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal dalam membangun kolaborasi, mengelola sumber daya, serta menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dalam perspektif *Collaborative Governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor-aktor yang terlibat, tetapi juga oleh kualitas interaksi yang dibangun di antara mereka. Emerson dan Nabatchi (2018) menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga dimensi tersebut mulai berkembang di Desa Tlogopakis. Principled engagement terlihat melalui forum musyawarah desa dan diskusi lintas pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pengembangan wisata. Shared motivation tercermin dari adanya komitmen bersama untuk menjadikan wisata alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi desa. Sementara itu, capacity for joint action diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan penyusunan dokumen perencanaan wisata. Akan tetapi, kapasitas tindakan bersama tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pembiayaan, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan program pendampingan agar kolaborasi tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan pendampingan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola wisata alam. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pemerintah desa memperoleh dukungan dalam penyusunan roadmap pengembangan wisata, penguatan kapasitas aparatur desa, penyusunan regulasi, serta pemberdayaan BUMDes dan Pokdarwis. Pendampingan tersebut menjadi bentuk implementasi model quadruple helix yang mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam pembangunan desa wisata. Penelitian Fitriana et al. (2024) menunjukkan bahwa model kolaborasi berbasis multi-helix mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan karena setiap aktor berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, keberadaan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator inovasi kelembagaan dan penguatan kapasitas pemerintah desa.

Implementasi tata kelola wisata alam di Desa Tlogopakis menunjukkan adanya transformasi menuju model tata kelola yang lebih kolaboratif dengan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat, serta mitra eksternal. Pendekatan kolaboratif tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pengelolaan pembangunan desa yang tidak lagi bersifat sentralistis, tetapi menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Dalam perspektif *collaborative governance*, keterlibatan berbagai aktor memungkinkan terjadinya integrasi sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas kelembagaan yang saling melengkapi dalam mengelola potensi wisata alam secara lebih efektif. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi tersebut masih berada pada tahap penguatan karena belum seluruh aktor memiliki kapasitas dan tingkat keterlibatan yang seimbang dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan tata kelola kolaboratif memerlukan proses institusionalisasi yang berkelanjutan agar hubungan antarlembaga tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang didasarkan pada tujuan bersama.

Berbagai tantangan kelembagaan yang masih dihadapi menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tata kelola wisata alam belum sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan aktor yang terlibat, melainkan juga oleh kualitas hubungan koordinatif yang terbangun di antara mereka. Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendasar untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, meningkatkan sinkronisasi program, serta memperjelas mekanisme komunikasi antarorganisasi. Di samping itu, penyusunan regulasi operasional yang lebih komprehensif diperlukan sebagai pedoman dalam mengatur pembagian tugas,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

pengelolaan aset wisata, mekanisme pembiayaan, hingga sistem akuntabilitas pengelolaan destinasi. Penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dan Pokdarwis juga menjadi agenda strategis mengingat kedua institusi tersebut merupakan pelaksana utama dalam operasional pengelolaan wisata di tingkat desa. Peningkatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, tata kelola keuangan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, pemasaran, dan pengelolaan informasi wisata menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata alam di tengah perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya dipandang sebagai instrumen pemasaran, tetapi juga sebagai bagian dari modernisasi tata kelola yang mendukung transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan wisata desa.

Keberlanjutan implementasi tata kelola wisata alam pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*). Kepemimpinan tersebut tidak hanya berorientasi pada koordinasi administratif, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan (trust building), memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, memediasi berbagai kepentingan antarpemangku kepentingan, serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi bersama yang bersifat partisipatif. Melalui kepemimpinan yang adaptif dan inklusif, pemerintah desa dapat menciptakan ekosistem kelembagaan yang mendorong keberlanjutan kolaborasi dalam pengelolaan wisata alam. Dengan demikian, implementasi tata kelola wisata tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan destinasi wisata, tetapi juga menjadi media penguatan kapasitas kelembagaan desa yang mampu mendorong terciptanya pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat hasil penelitian Nurwanda et al. (2024) serta Pusparini dan Dirgantara (2025) yang menegaskan bahwa tata kelola wisata berbasis kolaborasi mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, memperkuat efektivitas implementasi kebijakan publik, serta menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi masyarakat melalui sinergi antarpemangku kepentingan.

Implikasi Implementasi Kebijakan Tata Kelola Potensi Wisata Alam terhadap Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam di Desa Tlogopakis memberikan implikasi yang signifikan terhadap penguatan kemandirian ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata Curug Bajing dan potensi ekowisata lainnya telah membuka ruang bagi tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi lokal, seperti usaha kuliner, penyediaan jasa parkir, perdagangan cendera mata, jasa pemandu wisata, penyewaan perlengkapan wisata, serta usaha mikro berbasis rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian desa melalui peningkatan peluang usaha dan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Namun demikian, kontribusi ekonomi tersebut belum sepenuhnya merata karena keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap modal, informasi, dan jaringan usaha. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan wisata perlu diarahkan pada perluasan akses ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Program pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas yang dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan usaha wisata dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Masyarakat mulai memanfaatkan peluang ekonomi melalui pengembangan produk lokal, peningkatan kualitas pelayanan wisata, serta diversifikasi usaha berbasis potensi desa. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa sebagian pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam aspek manajemen usaha, akses pembiayaan, inovasi produk, dan pemasaran digital. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pelatihan jangka pendek, tetapi memerlukan pendampingan berkelanjutan yang mampu meningkatkan daya saing usaha lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Simanihuruk et al. (2024)

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

yang menyatakan bahwa pembangunan desa wisata akan memberikan dampak ekonomi yang optimal apabila disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola, dan partisipasi aktif warga dalam seluruh proses pembangunan.

Masyarakat dalam perspektif *Community-Based Tourism* (CBT) merupakan aktor utama sekaligus penerima manfaat utama dari pengembangan pariwisata. Implementasi kebijakan pemerintah desa telah mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan wisata, mulai dari penyediaan jasa wisata hingga pengembangan produk ekonomi kreatif. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi karena dipengaruhi oleh kapasitas individu, tingkat pendidikan, kepemilikan modal, dan akses terhadap informasi. Oleh sebab itu, penguatan kemandirian ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi yang adil melalui pemberdayaan kelompok usaha mikro, perempuan, dan pemuda desa. Hasil penelitian Manaf et al. (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan *community-based tourism* tidak hanya diukur dari pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengendalikan proses pembangunan, memperoleh manfaat ekonomi, serta menjaga keberlanjutan sumber daya lokal.

Implementasi kebijakan tata kelola wisata juga memberikan dampak terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa. Pemerintah Desa Tlogopakis mulai mengoptimalkan peran BUMDes sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengelola unit usaha wisata secara profesional dan berkelanjutan. Walaupun kapasitas kelembagaan tersebut masih memerlukan penguatan, keberadaan BUMDes berpotensi menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola ekonomi desa yang lebih mandiri. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku usaha, dan perguruan tinggi telah menciptakan ekosistem kelembagaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengembangan wisata. Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan tersebut merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor ekonomi tradisional. Penelitian Pusparini dan Dirgantara (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan lokal, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam di Desa Tlogopakis telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, meskipun dampaknya belum sepenuhnya optimal. Pengembangan wisata telah menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi desa yang lebih adaptif. Akan tetapi, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap pembiayaan, promosi digital, inovasi produk wisata, serta koordinasi antarpemangku kepentingan. Keberlanjutan pembangunan ekonomi desa memerlukan implementasi kebijakan yang lebih integratif melalui penguatan kapasitas pemerintah desa, optimalisasi peran BUMDes dan Pokdarwis, perluasan partisipasi masyarakat, serta pengembangan model tata kelola kolaboratif yang mampu menjamin pemerataan manfaat ekonomi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Fitriana et al. (2024), Nurwanda et al. (2024), dan Garis et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa tata kelola wisata berbasis kolaborasi menjadi faktor strategis dalam menciptakan pembangunan desa yang inklusif, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peran strategis Pemerintah Desa Tlogopakis dalam implementasi kebijakan tata kelola potensi wisata alam menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi sentral dalam mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator yang tidak hanya berfokus pada penyusunan kebijakan, tetapi juga pada pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

kolaborasi antarpemangku kepentingan serta pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata alam tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan potensi alam yang dimiliki desa, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan pemerintah desa, serta penerapan tata kelola yang kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Implementasi kebijakan tata kelola wisata alam di Desa Tlogopakis telah memberikan dampak positif terhadap penguatan kelembagaan desa sekaligus peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengembangan sektor wisata mampu menciptakan peluang usaha baru, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain belum optimalnya regulasi operasional pengelolaan wisata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pengelolaan destinasi, serta belum terbangunnya koordinasi dan partisipasi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola wisata yang berkelanjutan.

Pemerintah Desa Tlogopakis perlu memperkuat implementasi kebijakan melalui penyusunan regulasi pengelolaan wisata yang lebih komprehensif, adaptif, dan memiliki kepastian dalam pembagian kewenangan antaraktor. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelola BUMDes, dan Pokdarwis perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kompetensi di bidang tata kelola destinasi, kewirausahaan, pemasaran digital, dan pelayanan wisata. Pemerintah desa juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi, pengelolaan data wisata, dan pengembangan sistem pelayanan yang lebih efektif sehingga mampu meningkatkan daya saing destinasi wisata alam di Desa Tlogopakis.

Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan model tata kelola kolaboratif melalui perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sebagai bentuk sinergi dalam pengembangan wisata berbasis potensi lokal. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam pengelolaan destinasi, meningkatkan investasi dan promosi wisata, serta memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai efektivitas model *collaborative governance*, digitalisasi tata kelola desa wisata, maupun pengukuran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih komprehensif sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pembangunan desa berbasis pariwisata yang berkelanjutan.

REFERENSI

Annisa, Indy. (2026). Implementasi Penyediaan Informasi Kepariwisataan Di Kabupaten Tanggamus Perspektif Siyasah Tanfidziyah. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13 (6), 82-90

Bingham, A. J. (2023). From data management to actionable findings: A five-phase process of qualitative data analysis. International Journal of Qualitative Methods, 22, 1–13. https://doi.org/10.1177/16094069231183620

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). Sage Publications.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2018). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.

Faturohman, D., & Subhan. (2026). Collaborative governance in community-based tourism policy for sustainable tourism development. Journal of Law, Social Science and Humanities, 11 (7), 20-31

Fikri, Muhamad, Akbar, Rijalul, dkk. (2026). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

Fitriana, A. N., Wijaya, A. F., & Wanto, A. H. (2024). Implementation of tourism village policy based on the collaborative governance plus multi-helix (CGPMH) model in Pujon Kidul Tourism Village, Malang Regency. Journal of Governance.

Garis, R. R., Nursetiawan, I., & Younus, M. (2025). Multi-actor collaborative village tourism governance in strengthening community economic resilience. Government and Resilience Journal.

Im, M. Y., & Pyo, J. (2023). Qualitative research in healthcare: Data analysis. Journal of Preventive Medicine and Public Health, 56(3), 209–216. https://doi.org/10.3961/jpmph.22.471

Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Sustainability, 10(7), 2142. https://doi.org/10.3390/su10072142

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Sage Publications.

Nuh, M., Mawardi, M. K., Parmawati, R., & Abdillah, Y. (2024). Collaborative governance model in sustainable village tourism development. Quality – Access to Success.

Nurwanda, A., Daraba, D., Suprajogo, T., & Puspita, D. (2024). Collaborative governance in tourism village development in Ciamis Regency, West Java Province, Indonesia. International Journal of Science and Society.

Pusparini, M., & Dirgantara, A. R. (2025). Policy implementation in community-based tourism village development: A case study of Selindung Jerambah Gantung, Pangkalpinang City. Infonomics.

Rural tourism initiatives and their relationship to collaborative governance and perceived value: A review of recent research and trends. (2024). Journal of Destination Marketing & Management, 33, 100939.

Sampetamma, Y., Herman, H., & Rizal, M. (2026). Collaborative governance in community-based tourism development in Kete Kesu Tourism Village, North Toraja Regency. International Journal of Public Policy and Bureaucracy.

Simanihuruk, M., Arafah, W., Rahmanita, M., & Hadi, P. (2024). The role of governance, social welfare, and community participation on sustainable tourism village. International Journal of Research and Review, 11(6), 485–497.